

PEMILU DAN PILKADA SERENTAK 2024 DI TENGAH PANDEMI

Pramono U. Tanthowi
Anggota KPU RI

26 September 2021

PERTANYAAN UTAMA

- Bagaimana strategi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 jika covid-19 masih bersifat pandemik?
- Apa saja langkah-langkah terobosan yang bisa dilakukan dan apa prasyaratnya?

SKENARIO I

- Pandemi semoga telah berakhir.
- Tahapan-tahapan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 dilaksanakan sesuai Protokol Kesehatan dengan berbagai pelanggaran terbatas.
- Kondisi setiap daerah akan sangat menentukan.
- Kondisi setiap daerah sangat dinamis.
- Contoh pelanggaran:
 - Pengajuan daftar caleg ke KPU oleh parpol dapat dihadiri maksimal 25-30 orang.
 - Kampanye terbatas dan tatap muka dapat dihadiri maksimal 75-100 orang.

SEBERAPA BESAR PELUANGNYA?

- Jika *herd immunity* (kekebalan komunitas), baik tingkat nasional maupun local, bisa segera tercapai.
- Target : 208 juta, 2,3 juta vaksinasi per hari.
- Data Satgas kemarin: 85,5 juta dosis I, 47,9 Dosis II.
- Tantangan:
 - Ketersediaan vaksin (260-270 juta).
 - Distribusi ke daerah?
 - Kemampuan fasilitas dan tenaga Kesehatan?
 - Kemauan masyarakat untuk di-vaksin (SMRC/Maret 2021: 73%; Charta/Agustus: 72,4%).

SKENARIO II

- Tahapan-tahapan Pemilu dan Pilkada 2024 dilaksanakan di tengah pandemi.
- Belajar dari pengalaman Pilkada 2020:
 - Tidak menjadi cluster baru penyeberan covid.
 - Tingkat partisipasi naik.
- Belajar dari pengalaman negara-negara lain, hingga 21 September 2021 (IDEA):
 - 79 negara menunda Pemilu (nasional/local).
 - 137 negara melaksanakan pemilu (57 negara pada awalnya menunda).

KUNCI KEBERHASILAN

- Adanya regulasi yang mengatur Protokol Kesehatan yang mudah dipahami dan dilaksanakan.
- Dukungan dari semua kekuatan politik (koalisi maupun non-koalisi pemerintahan).
- Kedisiplinan KPU dan jajarannya dalam menerapkan protocol Kesehatan.
- Kedisiplinan Pengawas Pemilu dalam mengawasi dan menegakkan hukum.
- Kedisiplinan peserta pemilu dan masyarakat.
- Dukungan anggaran dari pemerintah (untuk memenuhi kelengkapan APD).

SERENTAK 2024?

- KPU menghadapi dua tantangan sekaligus:
 - ✓ Beban pekerjaan yang lebih besar dibanding Pemilu 2019 maupun Pilkada 2020.
 - ✓ Ancaman pandemi masih mungkin akan mengiringi.
- Apa yang bisa dilakukan?

LANGKAH TEROBOSAN

- ❑ Penyiapan regulasi sejak jauh hari.
- ❑ Melakukan berbagai modifikasi teknis pelaksanaan tahapan untuk mengurangi beban sekaligus menyesuaikan dengan Protokol Kesehatan, seperti:
 - Pendaftaran partai politik secara elektronik menggunakan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Memperkuat proses pemutakhiran data Sipol secara berkelanjutan.
 - Memodifikasi teknis pelaksanaan kampanye (sebagaimana Pilkada 2020).

LANGKAH TEROBOSAN

- Penyederhanaan desain surat suara (2-3 surat suara). lima jenis pemilu tidak mesti lima surat suara.
- Diversifikasi metode pemungutan suara (selain datang ke TPS pada hari H), misalnya: *early voting* dan *drop box* (kotak suara keliling).
- Diterapkan rekapitulasi secara elektronik (Sirekap) untuk meringankan beban KPPS dalam menyalin Form C-Plano dan menyederhanakan proses rekapitulasi (yang selama ini dilakukan manual dan berjenjang).

PRASYARAT:

- Berbagai modifikasi di atas memerlukan payung hukum yang kokoh, berupa:
 - Revisi Terbatas UU Pemilu dan UU Pilkada. Khusus menyangkut teknis pelaksanaan tahapan; atau
 - Perppu: untuk mengakomodasi berbagai usulan modifikasi di atas; atau
 - Peraturan KPU yang disepakati bersama untuk dijalankan oleh semua pihak.
- Jika tidak ada payung hukum yang kokoh, rawan untuk disengketakan oleh para pihak.

PRAMONO U. TANTHOWI

Kab. Semarang,
17 Januari 1975

- Komisioner KPU RI (2017 – sekarang).
- Ketua Bawaslu Provinsi Banten (2012-2017).
- (Ex Officio) Anggota DKPP RI (2020-2022).

- S1 – Fakultas Syari'ah UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1992-1997.
- S2 – Departemen Ilmu Politik, University of Hawaii at Manoa, AS, 2006-2008.

- FB: Pramono U. Tanthowi
- Twitter: @PramonoUtan
- IG: pramono_utan